

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Primordialisme**

Primordialisme secara harfiah diartikan sebagai sebuah paham yang melekat pada masyarakat, keterikatan terhadap asal usul baik ras, adat istiadat, daerah kelahiran dan sebagainya. Paham tersebut mendarah daging menjadi sebuah keyakinan yang turut mendasari bagaimana cara pandang dan pola pikir masyarakat. Turunan dari paham primordialisme yakni perilaku primordial yang menjadi bagian dari perilaku politik. Dalam hal ini masyarakat memiliki karakteristik untuk dapat mengunggulkan seseorang yang berlatar belakang sama dengan mereka untuk dapat dipilih di ajang kontestasi politik yang diselenggarakan.

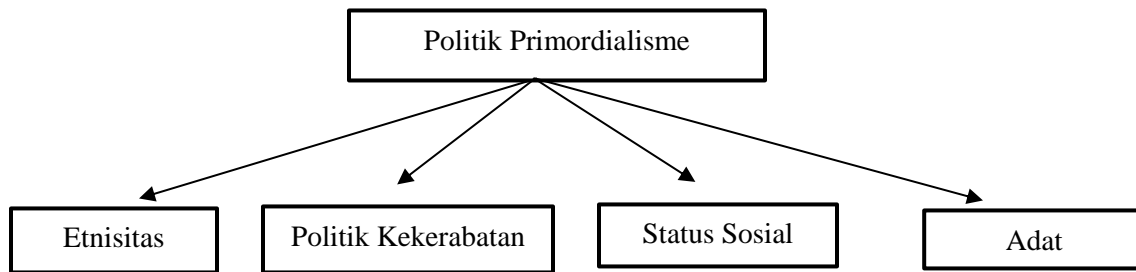
Primordialisme merupakan paham yang umumnya memiliki anggapan bahwa kelompok sosial telah dikarakteristikan oleh batas gambaran seperti wilayah, budaya, agama, organisasi, bahasa yang memang didasari secara objektif sebagai sesuatu hal pemberian dari sananya dan tidak ada satupun yang dapat membantah.<sup>1</sup> Primordialisme sangat terkait dengan keterikatan kekerabatan, daerah, agama, budaya, suku, adat dan bahasa.<sup>2</sup> Dari penjelasan diatas secara garis besar primordialisme dapat direpresentasikan dalam bagan berikut.

---

<sup>1</sup> Ubed Abdillah S. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Yayasan Indonesiatara. Hlm 43

<sup>2</sup> Muhtar Haboddin. *Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press. Hlm 3

**Gambar 2.1 Representasi unsur dalam politik Primordialisme**



*Sumber: Muhtar Haboddin (2015: 4)*

Terdapat beberapa unsur pendukung dalam terbentuknya paham primordialisme diantaranya

a. Etnisitas

Ikon yang paling nyata dari cara politik primordialisme daerah bekerja adalah bangkitnya persoalan mengenai etnisitas. Secara sederhana etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan kelompok yang dibentuk dan membentuk dirinya dalam kebersamaan atau kolektivitas. Pemahaman ini ingin menunjukkan bahwa kolektivitas lebih dominan daripada individualitas.<sup>3</sup> Politisasi etnisitas dipandang sebagai suatu hal yang penting bagi para elit politik dalam setiap ajang kontestasi politik yang diselenggarakan, tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan kekuasaan politik yang nantinya dapat mereka pergunakan untuk meraup keuntungan lainnya dalam

<sup>3</sup> Ubed Abdillah, op.cit. hlm 75

sektor ekonomi ataupun pemerintahan. Dengan kata lain politik etnisitas menjadi sebuah jalan yang menjanjikan dan terbukti efektif sebagai resep universal yang dengan ampuh dapat membangkitkan primordialisme. Salah satu contoh kentalnya politik etnis di Indonesia yakni terjadi di Kalimantan Barat, pemilihan Bupati di beberapa daerahnya diwarnai oleh konflik antara elit dari etnis Dayak dan Melayu. Seperti yang dikemukakan oleh Tanasaldy dalam Nordholt (2007) suku Dayak yang dalam hal ini merupakan suku asli dari Kalimantan memiliki keyakinan bahwa pemimpin yang berasal dari Dayak merupakan sosok terbaik untuk menjadi pemilik kekuasaan tertinggi di daerahnya bertentangan dengan keyakinan orang Melayu dimana mereka lebih menyukai latar belakang agama dan merasa lebih modern dan maju serta lebih terintegritas dengan pemerintah pusat ketimbang suku lainnya menjadi factor perpecahan hasil Pilkada di Kabupaten Sintang tahun 1994.<sup>4</sup> Kasus konflik politik etnis seperti tadilah yang mewarnai negara multikulturalisme seperti Indonesia dalam pelaksanaan kontestasi politik yang dilaksanakan di daerah.

b. Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan ataupun politik dinasti sebagai patologi politik yang ada di Indonesia adalah konsepsi klasik dalam kajian politik

---

<sup>4</sup> Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 13

pemerintahan. Praktik politik kekerabatan lahir dan hadir secara historis di Indonesia sejak zaman penjajahan. Faktor mempertahankan apa yang sudah dibangun dan diraih dengan melibatkan sanak saudara dekat bahkan keluarga menjadi dasar atas terselenggaranya politik kekerabatan. Politik dinasti seperti ini konon menjadi cara ampuh untuk asupan egosentris elit politik dalam tujuan tidak sepenuhnya melepaskan kekuasaan yang pernah ada di genggaman. Fenomena politik kekerabatan seperti ini akan sangat terlihat jelas ketika memasuki tahun kontestasi. Terdapat kondisi dimana masyarakat akan dihadapkan lagi dengan pilihan orang-orang terdekat dari orang pemerintahan sebelumnya. Dewasa ini masyarakat sudah menjadi lebih kritis dan peka terhadap fenomena politik dinasti yang ada.<sup>5</sup> Adanya hasrat untuk memperjuangkan hak yang seharusnya dimiliki mereka akan melakukan aksi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Melalui pengaruh dan kekuasaan yang terlihat sangat besar menjadikan masyarakat akan semakin termotivasi untuk dapat mempertanyakan bagaimana hal ini dapat dengan langgeng terjadi.

c. Status Sosial

Adanya sejumlah aktor politik yang datang dengan latar belakang keluarga bangsawan menjadi sebuah fenomena sosial yang hadir di tengah kehidupan pemerintahan Indonesia.<sup>6</sup> Mereka yang merupakan

---

<sup>5</sup> Muhtar haboddin op.cit. hlm 10

<sup>6</sup> Ibid

bagian dari penguasa sektor industri, ekonomi, pertahanan dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Hal ini sejalan dengan adanya stigma bahwa status sosial merupakan aspek yang perlu diperhitungkan dalam pembentukan citra politik seseorang. Bagaimana mereka dapat menggunakan kelebihan yang sering disebut sebagai "*privilege*" untuk dapat meraih simpati dan perhatian masyarakat. Terjadinya hal tersebut juga memunculkan fenomena pelabelan di masyarakat yang berpikir bahwa kelebihan yang dimiliki kaum bangsawan dapat memudahkan mereka dalam berbagai hal. Peristiwa feodalistik yang secara geologis juga pernah terjadi pada zaman kesultanan Jawa dahulu dapat menjadi bukti nyata bahwa sejak dahulu kala masyarakat akan dipusatkan perhatiannya terhadap kaum elit dengan segala kekuasaannya. Mengingat hal tersebut saat ini tidak sedikit para pengusaha yang turut melebarkan karirnya di bidang politik dan memandangnya sebagai hal yang menjanjikan.

d. Adat

Masyarakat lokal memandang adat sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi sebuah warisan atas kebudayaan yang perlu dijaga dan dihormati. Identitas tersebut berkembang menjadi norma yang dipatuhi oleh masyarakat atas dasar keyakinan sejak lama yang membatasi mereka dalam berkehidupan. Adat menjadi sebuah ornamen penting bagi mereka yang percaya dan eksistensinya tidak pernah padam. Bagi masyarakat yang memegang teguh adat mereka akan selalu

membutuhkan pemimpin untuk menuntun mereka dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena Indonesia kaya akan budaya serta adat istiadat maka sebagian masyarakat akan senantiasa hidup berdampingan dengan adat.

Trend primordialisme dalam perilaku pemilih di pesta politik juga masi terbilang baru mengingat implikasinya terbentuk pola politik kekerabatan dalam tubuh pemerintahan.<sup>7</sup> Hal ini mengingat maraknya pion-pion pemerintahan yang berisikan keluarga dari para petahanan sebelumnya. Bukan tanpa sebab fenomena ini juga merupakan perwujudan dari perilaku pemilih yang lebih menyukai para wakil rakyat yang berasal dari daerah tersebut. Latar belakang keluarga, daerah, status sosial tidak lepas juga dari sudut pandang pemilih.

### **2.1.2 Perilaku Pemilih**

Dalam ajang Pemilu/Pilkada masyarakat yang memiliki hak pilih dapat kita sebut dengan istilah pemilih. Pemilih disini merupakan orang yang memenuhi syarat untuk dapat menyalurkan hak politik mereka dengan memilih kandidat calon dalam ajang kontestasi politik. Pemilih merupakan suatu kelompok masyarakat dengan ideologi tertentu yang selanjutnya termanifestasi dalam sebuah institusi politik seperti halnya partai politik. Sebagai mana telah dijelaskan bahwa seseorang perlu memenuhi beberapa kriteria agar dapat disebut sebagai pemilih. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

---

<sup>7</sup> Ibid hlm. 5

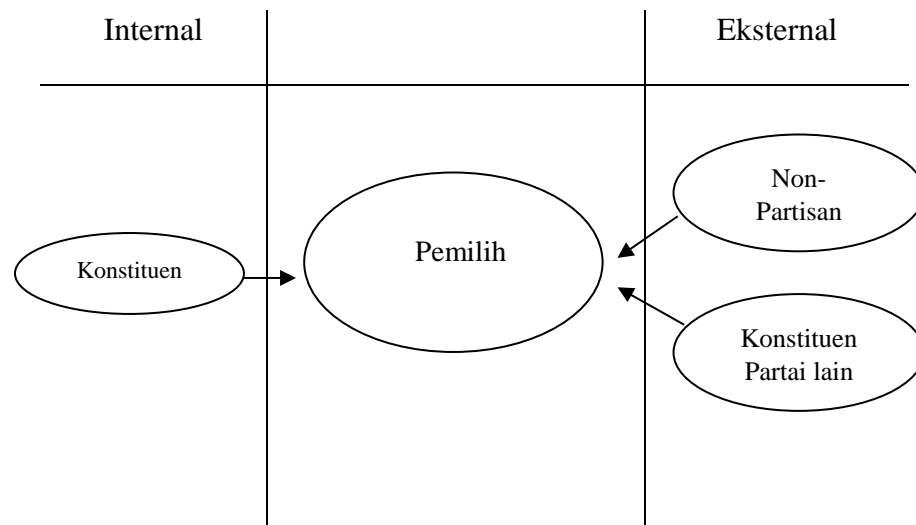
Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat:

- a) Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d) berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/ atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e) dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan kartu keluarga; dan
- f) tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pemilih akan menjadi aksentu dalam proses pemilihan nantinya karena hak politik mereka merupakan konsen penting dalam perhelatan ini. Pemilih sudah tentu memiliki kebebasan mutlak untuk dapat menentukan pilihan dalam ajang tersebut. Pada hakikatnya pemilih memiliki kecenderungan sikap untuk menentukan pilihannya atau dapat disebut dengan perilaku pemilih. Perilaku pemilih menjadi hal yang menarik banyak perhatian mengingat konteks ini akan sangat kompleks karena banyak sekali faktor yang

mempengaruhi di dalamnya. Menurut Schumpeter pemilih akan mendapatkan banyak informasi politik dalam jumlah besar serta beragam yang seringkali berasal dari berbagai macam sumber bahkan suatu hal yang kontradiktif sekalipun.<sup>8</sup>

**Gambar 2.2 Pembagian Jenis Pemilih**



*Sumber: Firmanzah (2008 : 86)*

Karakteristik pemilih telah sejak lama menarik perhatian para ahli, banyak dari mereka yang membuat teori melalui analisis dan diskusi terkait seperti apa karakteristik pemilih. Keputusan untuk memilih dalam lingkup penyaluran hak politik menjadi suatu hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor di sekitar. Kita semua memiliki kesadaran akan keputusan untuk memilih yang berbeda beda dan terlihat dengan signifikan yang dipengaruhi

<sup>8</sup> Schumpeter, A 'Capitalism socialism and democracy' dalam Syafhendry. *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2016. hlm 43



oleh faktor ekonomi dan komersil.<sup>9</sup> Selanjutnya keputusan yang diambil oleh pemilih dapat digambarkan seperti halnya hasrat membeli para konsumen apabila dalam dunia bisnis dan ekonomi. Pembelian akan efektif dan sangat berguna ketika konsumen dapat memutuskan untuk memilih barang yang memiliki nilai utilitas tinggi, barang tersebut akan tepat guna dan memiliki nilai fungsi tinggi serta dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang lama. Namun dalam analogi pembelian barang, konsumen akan langsung merasakan dampak atas kesalahan mereka ketika mengambil keputusan untuk memilih barang yang tidak tepat guna. Barang tersebut tidak akan bertahan lama serta kehilangan nilai utilitasnya. Berbeda dengan konteks pemilih yang salah mengambil keputusan untuk memilih seseorang dalam kontestasi poltiik, dampaknya tidak akan terasa secara langsung melainkan akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut juga dikaitkan dengan jumlah suara yang berlaku pada sistem demokrasi. Sistem ini akan terlihat jelas hasilnya ketika mayoritas dari masyarakat melakukan hal yang sama. Karena dalam sistem ini hasrat dan pilihan individu dalam jumlah sedikit akan bias ataupun tidak memiliki kejelasan arah untuk kedepannya dan pada hasil keseluruhan. Menariknya keputusan individu akan menguat dalam demokrasi ini ketika mereka memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi persepsi publik atas suatu hal yang mereka percayai.

---

<sup>9</sup> Downs 'an economic theory of democracy' dalam Safhendry. *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*, Pekanbaru: Alaf Riau.2016. hlm 42

Dalam sudut pandang lain Brennan dan Lomasky dalam Syafhendry menyatakan bahwa perilaku pemilih merupakan sesuatu yang ‘ekspresif’, mereka mengekspresikan hal tersebut kurang lebih seperti para supporter sepakbola dalam memilih klub favorit mereka.<sup>10</sup> Dukungan tersebut menurut mereka berkaitan erat dengan ideologi dan loyalitas yang mereka miliki masing-masing. Seperti halnya berlaku bagi para pemilih yang menggantungkan pilihannya pada loyalitas mereka terhadap suatu partai politik. Pemilih akan melirik partai dengan ideologi yang dirasa relevan dengan apa yang mereka yakini juga diiringi loyalitas yang tinggi. Tidak akan ada loyalitas tercipta ketika hubungan yang dijalin partai kurang baik dengan para pemilih. Pentingnya hubungan baik yang dibangun oleh partai terhadap masyarakat menjadi kunci atas pilihan masyarakat. Hal ini juga lah yang menjadi pertimbangan para pemilih untuk memiliki loyalitas terhadap partai. Mereka akan merelakan pilihannya ketika partai juga memberikan timbal balik hubungan yang baik terhadap mereka. Untuk itu setiap partai memiliki strategi pendekatannya masing-masing untuk dapat menarik simpati rakyat.

Menurut Huntington perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan hal yang berkesinambungan dan tidak dapat terpisahkan.<sup>11</sup> Sebuah partisipasi politik dapat terbentuk dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui ajang

---

<sup>10</sup> Brennan, G., & Lomasky, L ‘Democracy and Decision’ dalam Syafhendry. *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*. Pekanbaru: Alaf Riau. 2016. hlm 43

<sup>11</sup> Tri Hapsari Kaesmetan. *Studi Perilaku Pemilih pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan dalam Jurnal Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu Edisi I*. 2019. Hlm 2

pemilihan yang mencakup suara, upaya sumbangan dalam kampanye, ikut andil dalam suatu proses pemilihan dan dalam cakupannya mencari dukungan bagi calon atau berbagai kegiatan yang akan mempengaruhi hasil dari proses pemilihan.

Menurut Bartels setidaknya ada tiga pendekatan yang menjadi dasar perilaku pemilih dalam memilih yakni *The Columbia Study*, *The Michigan Model*, dan *Rational Choice*.<sup>12</sup> Ketiganya lebih sering dikenal sebagai konsep pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Dijelaskan dalam Haryanto bahwa pendekatan sosiologis ataupun *The Columbian Study* cenderung memeperlihatkan keberadaan pengaruh dalam nilai sosiologis yang ada pada individu yang menjadi dorongan mereka untuk menentukan pilihan politik.<sup>13</sup> Hal tersebut diantaranya berupa agama, status sosial, etnisitas serta adat ataupun tradisi dan lainnya. Selanjutnya *The Michigan Model* dalam Haryanto pendekatan psikologis dalam perilaku pemilih dapat digambarkan modelnya seperti corong kausalitas.<sup>14</sup>

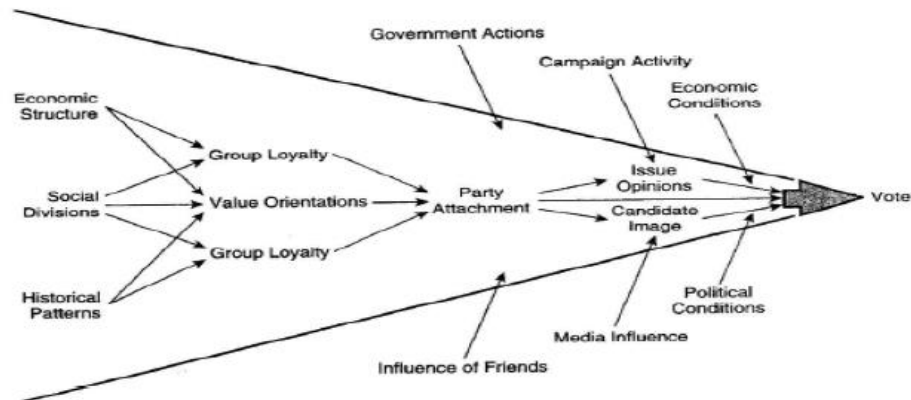
---

<sup>12</sup> Haryanto. *Identity and Programmatic Politics in Javanese Village Chief Election: The Case of Temon Kulon*, Yogyakarta. 2019. Hlm 292

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 293

<sup>14</sup> Dalton *Ibid*, hlm 294

**Gambar 2.3 Corong Kausalitas dari the Michigan Model**



*Sumber: Dalton (2002) dalam Haryanto (2014:293)*

Dapat dilihat bahwa dalam corong kausalitas yang memuat apa saja faktor pengaruh dalam pendekatan psikologis diantaranya berawal dari struktur ekonomi, pandangan sosial dan pola sejarah. Kemudian berkembang didalamnya memuat loyalitas kelompok dan orientasi makna yang menghasilkan adanya hubungan pengaruh dari pendekatan partai adapun ada beberapa pengaruh dari luar berupa aksi dari pemerintahan, pengaruh dari rekan sebaya. Selanjutnya dari faktor pengaruh media dan aktivitas kampanye maka akan terbentuklah isu politik serta citra kandidat. Kemudian akan semakin mengerucut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik yang pada akhirnya akan menghasilkan pilihan politik seseorang. The Michigan Model ini merupakan sebuah pendekatan psikologis yang menekankan pada pilihan berdasarkan hati nurani seseorang, bergantung pada psikis pemilih dengan dipengaruhi oleh suhu politik di sekitarnya.

Dan yang ketiga yakni pendekatan pilihan rasional atau *Rational Choice* lahirnya pendekatan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dua

pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini didasarkan atas pengaruh ekonomi, pola berpikir rasional masyarakat yang dihadapkan dengan realita kehidupan. Parameter lahirnya teori pendekatan ini berasal dari kepentingan ekonomi politik. Hematnya teori ini didasarkan oleh kepentingan pribadi dan optimalisasi manfaat atas aksi yang diberikan oleh pemerintah. Ketika aksi tersebut sifatnya menguntungkan secara finansial maka hal tersebutlah yang akan menjadi bidikan utama masyarakat dalam memilih.

### **2.1.3 Pilkada**

Sebagai bagian dari sistem demokrasi, Pilkada merupakan perwujudan partisipasi serta kerterwakilan politik masyarakat. Sistem Pilkada di Indonesia telah melewati beberapa kali perubahan seiring perkembangan zaman. Di era awal kemerdekaan kepala daerah dipilih berdasarkan hasil keputusan pemerintah pusat, calon kepala daerah pada masa tersebut diajukan oleh DPRD dan DPRD juga berhak untuk mengajukan pemberhentian kepala daerah yang terpilih kepada pemerintah pusat, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1948.<sup>15</sup> Selanjutnya pada periode berlakunya KRIS dan UUDS, kepala daerah dipilih oleh DPRD kemudian untuk kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan berdasarkan kuasa presiden dan untuk kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari calon yang diajukan oleh DPRD. Pada periode Orde lama mekanisme

---

<sup>15</sup> Wiredarme. *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia*, Mataram: Pustaka Bangsa Anggota IKAPI. hlm 69

pemilihan kepala daerah tercantum pada UU Nomor 18 Tahun 1965 yang berisikan kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan kurang lebih ketentuannya masih sama dengan yang sebelumnya diberlakukan. Untuk era orde baru pun untuk mekanisme pemilihan kepala daerah masih sama dengan era orde lama. Perubahan terjadi pada mekanisme pemilihan kepala daerah era reformasi, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah bahwa kepala daerah dipilih oleh masyarakat dan mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap DPRD.

Perubahan terhadap mekanisme pada Pilkada dilakukan guna menyesuaikan terhadap evaluasi yang didapat atas pelaksanaan sebelumnya. Perubahan yang terjadi diharapkan dapat membuat pelaksanaan Pilkada menjadi lebih baik dan meraup banyak partisipasi dari masyarakat. Meskipun tidak sebesar ajang pemilu Presiden karena memang pada kelas yang berbeda, Pilkada menghadirkan euphoria pemilih yang lebih intens. Mengingat ajang ini merupakan kontestasi politik tingkat daerah maka antusiasme masyarakat daerah terhadap Pilkada lebih tinggi. Hubungan antar akses dalam Pilkada jalinannya lebih dekat diperkuat dengan strategi politik partai yang ingin lebih dekat dengan masyarakat. Adapun dalam Pilkada sendiri setiap daerah akan memiliki cara khususnya masing-masing untuk dapat dekat dengan para calon pemimpin. Berbagai metode dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan demi diraihnya legitimasi masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada juga tidak terlepas dari unsur keberhasilan penyelenggara dalam membuat ajang ini diminati oleh masyarakat. Daya minat

masyarakat yang rendah dan cenderung tidak memiliki antusias terhadap pelaksanaan kontestasi politik juga akan berpengaruh langsung terhadap hasil yang didapatkan. Integritas lembaga penyelenggara dan pihak terkait lainnya menjadi faktor kunci atas kredibilitas hasil pemilukada yang diselenggarakan. Kegiatan-kegiatan baik pra maupun pasca Pilkada juga perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat kondisi masyarakat di setiap daerah akan berbeda. Pemilukada di daerah Jawa tentunya akan berbeda dengan yang dilaksanakan di daerah lain. Seperti contoh pemilukada di Papua yang masih minim dari berbagai segi baik pelaksanaan ataupun pemahaman para pemilihnya. Di Noken salah satunya menjadi daerah di Papua dengan tingkat konflik kekerasan yang marak ketika ajang Pilkada berlangsung, mulai dari fenomena *money politics, patronism, local strongman* yang diperkuat oleh materi menjadi permasalahan pemilukada di Papua. Belum lagi keteguhan dan kegamangan pihak berwenang seperti KPU, Bawaslu dan Kepolisian daerah setempat dalam menghadapi para pelaku politik menjadi akar dari permasalahan sengketa hasil pemilu.<sup>16</sup> Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwasanya pelaksanaan pemilu ataupun sistem Pilkada di Indonesia memerlukan banyak pembenahan. Baik dari pihak penyelenggara ataupun pemahaman masyarakat akan esensi ajang partisipasi politik ini. Namun di sisi lain system demokrasi yang ada di Indonesia ini mau tidak mau menjadi dasar paling fundamental atas pelaksanaan Pemilu.

---

<sup>16</sup> Kholilullah Pasaribu. *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, Jakarta: Perludem.2016. Hlm 18

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar konseptual dalam penelitian yang berisikan muatan indikator yang penting diperhatikan dalam pokok bahasan. Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan bahwa fokus fenomena yang diambil oleh peneliti yakni primordialisme dalam perhelatan kontestasi politik.

Dimulai dari fenomena yang peneliti amati yakni perhelatan pilkada di kabupaten cilacap pada tahun 2017. Pada ajang kontestasi politik pemilihan kepala daerah kabupaten ini diduga adanya indikasi pengaruh faktor primordialisme ataupun paham kedaerahan dalam pola perilaku pemilih. Hal ini yang kemudian menjadi fokus peneliti apakah memang benar adanya keberadaan paham primordialisme dalam mendasari keputusan pilihan politik masyarakat selaku pemilih. Selanjutnya paham primordialime yang akan peneliti representasikan yakni adanya pengaruh 4 faktor diantaranya etnisitas, status sosial, adat, dan politik kekerabatan.

Etnisitas yang dimaksud disini yakni asal-usul daerah pasangan calon yang akan sangat dipertimbangkan oleh pemilih. Yang kedua yakni status sosial, akan dipertimbangkan juga terkait kondisi ekonomi pasangan calon apakah memang berasal dari kalangan bagsawan atau sebagainya. Ketiga yakni adat yang diusung oleh calon dalam proses promosi ataupun kampanye. Dan yang keempat berupa unsur politik kekerabatan, akan ditelusuri apakah adanya hubungan keluarga dalam tubuh pemerintahan yang menghubungkan calon dengan faktor historis kekuasaan yang sebelumnya atau tidak. Keempatnya



merupakan faktor yang akan dipertimbangkan dan cenderung diutamakan dalam menentukan kepala daerah. Pada konteks ini masyarakat akan memilih pasangan calon yang bersifat representatif dan dapat memuat 4 indikator tadi dalam proses politiknya.

